



Dasar Hukum: 1 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa. 3 Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka.
Keterkaitan: 1. SOP Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Peringatan: 1 Apabila ditemukan barang / Jasa yang tidak sesuai akan di tegur secara lisan dan tertulis. 2 Penyampaian Teguran Pertama akan di tandatangi oleh Kepala Dinas 3 Apabila Pelaku Usaha tetap tidak patuh maka Penyampaian Teguran Kedua akan di tandatangi oleh Setda Prov. Kep. Babel 4 Waktu yang ditetapkan adalah waktu ideal selama pejabat berada di tempat

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadis	Kabid	Kasie	Pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintakan Kepala bidang Untuk membuat Rencana Pengawasan					Nota Dinas	15 menit	Disposisi	
2	Memerintakan Kepala Seksi Pengawasan Untuk membuat Rencana Pengawasan serta Lokus dan Barang/ Jasa yang akan diawasi					Nota Dinas	15 menit	Disposisi	
3	Menyiapkan Pelaksanaan Kegiatan					Rencana Kegiatan	1 Hari	- Juknis - Berita Acara - Kasat Mata - Tim Pelaksanaan	
4	Rapat Koordinasi dengan Staf/ Instansi yg terlibat					- Rencana Kegiatan	4 Jam	- KAK - Tim Pelaksanaan	
5	Pelaksanaan Pengawasan					Laporan Pengawasan	1 bulan	Laporan	
6	Rapat Evaluasi Pengawasan					Laporan Hasil Pengawasan	8 Jam	Laporan Kegiatan	